

Daftar Pustaka

Buku

- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.
- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Perpustakaan UI, Jakarta, 2008.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- C.F. Strong, *A History of Modern Political Constitution*, G. Allen & Unwin, London, 1963.
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996.
- Franz Wieacker, *A History of Private Law in Europe with Particular Reference to Germany*, diterjemahkan oleh Tony Weir, Clarendon Press, Oxford, 1995.
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie: Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh F. Isjwara, Alumni, Bandung.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, diterjemahkan oleh Somardi, Rindi Press, Jakarta, 1995.
- , *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight, University of California Press, Berkeley, 1967.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- , *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969.
- Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Wim Voermans, *Styles of Legislation and Their Effects*, Statute Law Review, 2011.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.

Jurnal

Agus Salim Andi Gadjong, "Analisis Konsep Pembagian Kewenangan Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2023.

Alfi Rosydati, Erlina, "Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)", *Badamai Law Journal*, Volume 9 Nomor1, 2024.

Claustantianus Wibisono Tanggono dkk, "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkualitas di Pemerintah Daerah", *Jurnal Juridisch*, Volume 1 Nomor 3, 2023.

Eny Kusdarini, "Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia", *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1, 2023.

Hermi Sari BN, "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Dinamika Sosial Budaya Journal*", Volume 22 Nomor 2, 2022.

Husin Ilyas, "Implikasi Pengalihan Sistem Pemerintahan Sentralistik Ke Sistem Otonomi Daerah Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 4, 2011.

Indah Pratiwi, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan, "Pengharmonisasian Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7 Nomor 4, 2024.

Kadek Tegar Wacika & Made Gde Subha Karma Resen, "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Kepala Daerah Pasca

Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 9, 2021.

Michael A. Pangemanan, "Urgensi Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Sebagai Intrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 8, 2016.

Monica Descariana, Jadmiko Anom Husodo, "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah", *Res Publica: Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Volume 8 Nomor 1, 2024.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, Volume 5 Nomor 6, 2020.

Sugiarto, A. H, "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah", *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 5 Volume 2, 2018.

Ririn Agustin Aritonang, "Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma", *Hangoluan Law Review*, Volume 2 Nomor 1, 2023.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2014.

Tri Oktavia Hilala, Marwan Djafar, Hijrah Lahaling, "Kewenangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo", *Journal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam*, Volume 5 Nomor 2, 2023.

Wicaksono, D. A, "Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah", *Padjadjaran Journal of Law*, No 2 Volume 3, 2015.

Zulkarnaen Noerdin, Robert Libra, Rachmad Oky S, "Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Volume 3 Nomor 2, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmoni-sasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Agung No. 03 P/HUM/2015 tentang Kewenangan Surat Edaran dalam Hierarki Hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 10 P/HUM/2017 tentang Uji Materiil terhadap Surat Edaran.